

BAB V

KESIMPULAN

Konflik Irlandia Utara sekilas nampak seperti konflik agama. Namun, jika dilihat dari akar konflik, konflik ini merupakan konflik etnos-nasional dimana terdapat dua kelompok yakni Nasionalis dan Unionis yang berbeda cara pandang mengenai etnis mereka. Sentiment agama pun membuat konflik ini bergeser ke arah konflik politik dan sosial. Perbedaan cara pandang akan etnis ini dimulai sejak abad ke-16. Nasionalis yang merupakan pemeluk Katolik berpandangan bahwa nenek moyang mereka merupakan bangsa Celtic, sedangkan para Unionis yang sebagian besar merupakan pemeluk Protestan mengklaim bahwa leluhur mereka adalah bangsa Cruthin. Perdebatan ini kemudian menjadi perdebatan agama ketika William of Orange atau William III seorang pemimpin Protestan merebut kedaulatan James II yang notabene seorang Raja Katolik di Inggris yang ketika saat itu juga menguasai Skotlandia dan juga Irlandia. Sejak saat itulah dominasi protestan di Britania Raya termasuk Irlandia dimulai.

Dominasi protestan di Irlandia turut mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik yang dibuat. Kebijakan-kebijakan tersebut dinilai mendiskriminasi masyarakat Katolik. Akibatnya, pemberontakan dari kelompok Katolik yang menyebut diri mereka sebagai Nasionalis. Mereka menuntut Irlandia memisahkan diri dari Britania Raya dan mendirikan negara kedaulatan sendiri. Irredentisme ini kemudian bergulir ke sebuah perjanjian bernama Home Rule Bill yang diusulkan oleh Perdana Menteri Inggris waktu itu, Gladstone tahun 1886. Merasa terancam dengan Home Rule Bill, Protestan Irlandia kemudian dibantu oleh konservatif untuk membentuk Unionis. Bertolak belakang dengan Nasionalis, Unionis bertujuan untuk mempertahankan posisi Irlandia di Britania Raya.

Pro-kontra Home Rule bergulir hingga Perdana Menteri Inggris terpilih tahun 1919, David Lloyd George mengusulkan perjanjian Government of Ireland Act pada tahun 1920. Perjanjian ini akhirnya memisahkan Irlandia menjadi dua, yakni Irlandia Utara dan Irish Free State yang kemudian berubah menjadi Republik Irlandia pada tahun 1949. Irlandia Utara terdiri dari enam wilayah di Ulster, sedangkan Republik Irlandia terdiri dari 26 wilayah. Namun, tiga wilayah di Irlandia Utara yaitu Fermanagh, Tyrone, dan Armagh yang sempat diajukan menjadi bagian dari Republik Irlandia, akhirnya menentukan kewarganegaraannya sendiri melalui referendum. Di tiga wilayah, masih terdapat banyak masyarakat Katolik, dan hanya 30% memeluk Protestan. Akhirnya, penduduk wilayah tersebut memilih menjadi bagian dari Irlandia Utara.

Setelah menjalankan pemerintahannya pasca Government Act of Ireland, dominasi protestan berada di Irlandia Utara yang sebelumnya terdapat kelompok Unionis. Dalam pembuatan kebijakan, Pemerintahan Protestan Irlandia Utara dirasa melakukan diskriminasi terhadap minoritas Katolik di Irlandia Utara. Diskriminasi yang paling berdampak dan dirasakan masyarakat Katolik adalah diskriminasi di bidang Politik, militer dan partisipasi ekonomi. Akhirnya, sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan diri sebagai NICRA melakukan pemberontakan dan menuntut persamaan hak asasi di Irlandia Utara. Aksi demi aksi dilakukan hingga terjadi banyak kekerasan di tahun 1960-an.

Tidak hanya kelompok pemberontak, namun paramiliter juga melakukan aksi dan tidak hanya menuntut persamaan hak namun juga menyuarakan irredentisme dengan bergabung ke Republik Irlandia yang sudah merdeka dari Britania Raya. Peristiwa kekerasan pertama yang cukup parah adalah bentrokan antara Unionis dan IRA ketika terjadi aksi long-march di Londonderry pada tahun 1969, kemudian Inggris harus turun tangan untuk mengakhiri IRA. Aksi ini menjadi pemicu aksi-aksi kekerasan lain hingga peristiwa berdarah Bloody Sunday

Killing terjadi pada bulan Januari tahun 1972 dimana tentara Inggris ditembak oleh demonstran Katolik dan membunuh tiga belas orang.

Melihat konflik yang terjadi selama bertahun-tahun ini mendesak beberapa pihak untuk segera mencari jalan keluar untuk mengakhiri konflik. Setidaknya ada tiga tiga perjanjian besar yang telah dibuat yakni *Sunningdale Agreement* 1973-1974, *Anglo-Irish Agreement* 1985-1986, dan *Downing Street Declaration* 1993-1996. Namun ketiganya gagal untuk megakhiri konflik *the troubles* ini.

Perjanjian pertama, *Sunningdale Agreement* yang disepakati pada tahun 1973. Secara garis besar, perjanjian ini memuat *power-sharing* yang disesuaikan dengan kerangka dimensi Irlandia. *Power-sharing* ini diaplikasikan dengan membentuk *Council of Ireland*. Dibentuknya Council of Ireland ini ternyata menuai penolakan dari kelompok Unionis yang menganggap bahwa hal tersebut hanya akan meneguhkan eksistensi Irlandia sebagai negara berdaulat. Pun tak hanya Unionis, IRA juga melakukan penolakan terhadap perjanjian tersebut dengan menyandera dua orang di London sebagai bentuk aksi protes. *Sunningdale Agreement* pun berakhir dengan mundurnya Faulkner dari Ketua Dewan Eksekutif.

Setelah kegagalan *Sunningdale Agreement*, pada tahun 1985 perundingan kembali diadakan. Namun kali ini hanya melibatkan dua pihak yakni Inggris dan Republik Irlandia. Perjanjian ini mengangkat persamaan hak minoritas di Irlandia Utara. Sayangnya, perjanjian ini kembali mendapat penolakan dari Unionis yang menganggap Thatcher sebagai penghianat karena menandatangani perjanjian dengan Republik Irlandia, mereka menganggap bahwa hal tersebut merupakan pengakuan Inggris akan negara tersebut. Meskipun SDLP menyambut perjanjian ini karena merasa bahwa kedaulatan persatuan Irlandia akan terwujud, namun partai besar di Republik

Irlandia justru menolak perjanjian ini karena menganggap pemerintah mendukung aksi Inggris untuk tetap melakukan intervensi di Irlandia Utara.

Penolakan dari Unionis atas perjanjian sngat serius, mereka melakukan long-march dan aksi kekerasan. Tidak hanya dari masyarakat sipil, namun protes juga terjadi di eksekutif yakni sebanyak 15 anggota Member of Parliament Unionis mundur dari parlemen. Setelah kegagalan *Anglo-Irish Agreement*, Taoiseach Albert Reynold dan Perdana Menteri Inggris John Major menandatangani *Downing Street Declaration* pada tanggal 15 Desember 1993. Deklarasi ini bertujuan untuk mengajak setiap pihak untuk duduk bersama dan melakukan perundingand amai secara demokratis. Lebih tepatnya, perjanjian ini meminta IRA dan Sinn Fein untuk melakukan gencatan senjata dan menyerahkan semua senjata yang mereka miliki dan memulai negosiasi. Permintaan gencatan senjata tidak hanya datang dari London maupun Dublin namun secara langsung disampaikan oleh Bill Clinton yang mengundang pemimpin Sinn Fein, Garry Adams ke Amerika.

Pada tanggal 31 Agustus 1994, IRA melakukan gencatan senjata pertama, namun Garry Adams tidak menjelaskan apakah gencatan senjata itu akan berlangsung secara permanen atau tidak. Pada tanggal 9 Desember 1994 Sinn Fein dan Inggris melakukan pembicaraan untuk pertama kali. Deklarasi ini seolah memberikan harapan bahwa perdamaian akan segera tercipta di Irlandia Utara. Namun, permintaan agar IRA dan Sinn Fein menyerahkan semua senjata ternyata tidak disepakati oleh IRA dan Sinn Fein. Mereka menganggap poin tersebut tidak tercantum dalam *Downing Street Declaration*.

Akhirnya, pada tanggal 9 Februari 1996 sebelum jam tujuh malam,IRA mengeluarkan pernyataan bahwa gencatan senjata telah berakhir dengan ditandai ledakan besar di Canary Wharf di London yang membunuh dua orang dan kerusakan parah. Setelah kegagalan *Downing Street*

Declaration, George Mitchell sebagai special envoy for Northern Ireland Conflict yang diutus langsung oleh Bill Clinton menyusun Mitchel Principle yang memuat adanya perundingan *multy track* dan penegasan bahwa perundingan harus berjalan secara demokratis dan tanpa kekerasan.

Pada bulan Juli 1997, IRA mengumumkan gencatan senjata yang kedua yang kali ini dilakukan secara total dan permanen. Akhirnya, perundingan memasuki babak baru. Sinn Fein masuk ke meja perundingan pada tanggal 15 September 1997, disusul oleh Unionis yang bergabung di meja perundingan tanggal 7 Oktober, pertemuan ini merupakan pertemuan pertama setelah konflik yang berlangsung hampir 30 tahun. Dalam perundingan yang berlangsung selama kurang lebih lima bulan akhirnya berhasil menyepakati perjanjian damai yang ditandatangani tanggal 10 April 1998 tepat di hari paskah. Perjajian ini kemudian dinamakan *Good Friday Agreement* atau dikenal dengan *Blefast Agreement*..

Disepakatinya *Good Friday Agreement* dipengaruhi beberapa faktor-faktor yang termuat dalam konten. Hal inilah yang menjadi pembeda *Good Friday Agreement* dan perjanjian sebelumnya. Faktor pertama adalah adanya rekonsiliasi semua pihak yang terlibat konflik dalam perundingan dan faktor kedua, konten perjanjian yang komprehensif yang mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak.

Faktor pertama, yakni rekonsiliasi menjadi alasan kuat kesuksesan perjanjian ini. Semua pihak yang terlibat dalam perjanjian ini termasuk IRA dan Sinn Fein bergabung dalam negosiasi. Akhirnya, *Good Friday Agreement* ditandatangani oleh para peserta perundingan yakni: Bertie Ahern- Taoiseach (Perdana Menteri Irlandia), David Trimble- Pemimpin UUP, Gerry Adams- Presiden Sinn Féin, John Hume- Pemimpin of SDLP, John Taylor- UUP negosiator, Martin McGuinness- Ketua negosiator Sinn Féin, dan Tony Blair- Perdana Menteri Britania Raya dan

Pemimpin Partai Buruh Inggris, dan perwakilan dari Ulster Democratic Party, Progressive Unionist Party, Northern Ireland Women's Coalition dan Alliance Party of Northern Ireland

Faktor kedua adalah konten perjanjian yang komprehensif. Terdapat tiga pokok penting yang terdapat dalam perjanjian *Good Friday Agreement* sehingga mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak, yakni *self-determination*, pengakuan identitas, dan kerjasama antar pulau.

Self-determination dan pengakuan identitas terdapat dalam Annex: *Agreement* between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of Ireland dalam klausul Constitutional Issues poin (v) dan (vi). Konten ini sangat penting mengingat konflik ini merupakan konflik identitas dimana sentiment akan identitas tersebut membawa diskriminasi dalam bidang politik, dan sosial ekonomi di Irlandia Utara. Kerjasama antar pulau terdapat dalam strand 2 dan strand 3 perjanjian *Good Friday Agreement*. Berbeda dengan *Anglo-Irish Agreement* yang hanya memuat kerjasama antara Inggris dan Irlandia tanpa melibatkan Unonis, dalam perjanjian ini kerjasama diperluas yakni utara-selatan dan barat-timur dengan pembentukan NSMC dan BIC.

Kestabilan *Good Friday Agreement* lebih kuat dibanding dengan perjanjian-perjanjian sebelumnya yang hanya bertahan rata-rata setahun. Hal ini karena adanya faktor hubungan host, kin state, dispute territory, dan pengaruh dari international context. Keadaan di Irlandia Utara sebagai host-state dan dispute territory cenderung kondusif dibanding ketika perundingan perjanjian-perjanjian yang sebelumnya. Hal ini karena adanya kepatuhan semua pihak akan Mitchell Principle, khususnya IRA dan Sinn Fein.

Good Friday Agreement juga disahkan oleh electoral di Irlandia dan Irlandia Utara sebagai kin-state melalui referendum pada tanggal 22 Mei 1998. Sehingga timbul kesan memiliki perjanjian ini. berbeda dengan perjanjian sebelumnya terutama Sunningdale yang memiliki kemiripan dengan konten *Good Friday Agreement*. *Sunningdale Agreement* hanya disepakati oleh Council of Ireland yang jelas ditentang pembentukannya oleh Unionis maupun Loyalist.

Dalam konteks internasional, adanya *intergovernmental institution* akan mengontrol dan menekan kelompok masing-masing baik bagi Inggris maupun Irlandia sehingga akan lebih fleksibel dalam menggunakan pendekatan yang bersifat mendamaikan untuk mengakomodasi kelompok Unionis. Pengaruh Bill Clinton sebagai Presiden Amerika Serikat saat itu sangat berpengaruh bagi proses perjanjian ini. dengan mengutus George Mitchell sebagai *Special Envoy of Northern Ireland Conflict*, Mitchell berhasil mewujudkan terciptanya perdamaian di Irlandia utara sebagai ketua negosiasi.

Faktor konteks internasional lain yang mendukung stabilitas perjanjian ini adalah penganugerahan Nobel Perjanjian untuk David Trimble dan John Hume pada tahun 1999. Dengan adanya penganugerahan ini akan memberikan tanggung jawab lebih bagi mereka untuk menjaga stabilitas *Good Friday Agreement*.

Proses perdamaian Irlandia Utara memang bukan lah proses perdamaian yang sempurna. Setelah *Good Friday Agreement* berhasil dicapai, beberapa aksi kekerasan menggunakan bom dan senjata api masih terjadi di beberapa tempat meskipun tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Namun *Good Friday Agreement* berhasil mengubah peta sosial Irlandia Utara secara demokratis.